Pemkab Kobar Relokasi UMKM dari CFD dan Tamkot, Siapkan Lokasi Baru di Pasar dan PP Mulai 21 April

Penulis Disperindagkop UKM Kobar, Jumat, 11 April 2025

MMC Kobar - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Jumat (11/4) melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati menyepakati relokasi pelaku UMKM dari area *Car Free Day* (CFD) Jalan HM Rafi'i, Taman Kota (Tamkot), dan Jalan Pemuda. Kebijakan ini diambil demi menciptakan ketertiban dan keindahan kota, tanpa mengabaikan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisperindagkopUKM) Kobar turut berperan aktif dalam merancang skema pemindahan. Kepala DisperindagkopUKM Alfan Khusnaini menyampaikan bahwa pihaknya meminta waktu satu minggu untuk menata alternatif lokasi relokasi.

"UMKM akan dipilah berdasarkan jenis komoditas dan kapasitas lokasi, dengan mempertimbangkan daya tampung di area Pasar Induk dan Pangkalan Bun Park," ujar Alfan.

Alfan mengungkapkan, sebanyak 235 pelapak dari CFD dan 50 pelapak dari Tamkot akan dipindahkan ke lokasi baru mulai 21 April 2025, dengan proses penataan awal dimulai 18 April.

“DisperindagkopUKM juga akan melakukan pendataan ulang dan penghitungan kapasitas agar relokasi berjalan tertib dan sesuai kebutuhan para pelaku UMKM,” lanjut Alfan.

Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak memberatkan UMKM. Wakil Bupati Suyanto menegaskan bahwa retribusi akan digratiskan selama masa transisi maksimal tiga bulan. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan area parkir alternatif di sekitar PP dan Jalan Palagan Sari untuk mendukung kenyamanan pengunjung dan pelaku usaha.

DisperindagkopUKM juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kecamatan dalam penataan teknis, termasuk penempatan pelapak, pengaturan parkir, hingga dukungan keamanan. Diharapkan, dengan tata kelola yang baik, UMKM dapat terus berkembang dan naik kelas di lokasi baru yang lebih terstruktur.

Penertiban juga akan diberlakukan secara menyeluruh bagi pedagang yang menggunakan trotoar dan area tidak sesuai peruntukan. Pemerintah berharap langkah ini menjadi awal transformasi menuju Kotawaringin Barat yang lebih tertib, rapi, dan mendukung kemajuan UMKM secara berkelanjutan.